

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kajian perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi (Grafiti, 2014). Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak pihak. Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro, kecil dan menengah telah diatur dalam hukum yaitu berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Seiring menjalankan aktivitas usaha seringkali pengelola UMKM merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahanya (Shonhadji dkk, 2017). Kesulitan tersebut menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usaha. Apalagi kalau harus dilakukan pengukuran dan penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam kegiatan usaha ataupun non usaha. Seringkali dalam skala usaha kecil menengah hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi daripada pendapatan sebelumnya. Padahal indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan transaksi atau kegiatan yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi.

Menurut hasil penelitian Andriani dkk, (2014) menunjukkan bahwa kelemahan pada usaha kecil di Indonesia adalah pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Usaha kecil yang belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting.

Selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Hal terpenting bagi pengelola usaha kecil adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi.

Kenyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Grafiti, (2014) menunjukkan bahwa pada umumnya UMKM tidak memiliki catatan laporan keuangan yang baik. Meskipun pelaku UMKM memiliki pencatatan laporan keuangan yang sederhana tetapi pelaku UMKM tidak dapat menunjukkan arus kas yang terjadi pada transaksi saat mereka menerima atau mengeluarkan kas. Sebagai patokan selama usaha mereka masih bisa berjalan dan masih mendapat kelebihan dana, maka pada saat itulah UMKM mengakui adanya laba. Padahal jika UMKM menerapkan pencatatan laporan keuangan dengan baik, UMKM dapat mengetahui arus kas yang terjadi pada usahanya. Sehingga dapat mengetahui asset atau perkembangan modal yang menyebabkan pengelolaan akan menjadi lebih baik. Maka perlu adanya penerapan pencatatan laporan keuangan yang lebih baik dan teratur.

Penerapan pencatatan laporan keuangan sangat diperlukan karena UMKM yang menghasilkan laba yang besar, tidak menjadi jaminan mendapatkan pinjaman dari bank dikarenakan sulitnya investor yang bersedia untuk meminjamkan atau menanamkan modalnya pada UMKM. Alasan yang mendasar adalah UMKM tersebut tidak dapat menunjukkan bukti operasional dan keuntungan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan selain untuk menarik investor, juga merupakan tahap awal dari penerapan akuntansi yang akan menghasilkan informasi dan mempunyai peranan penting, baik untuk penyusunan perencanaan, pengendalian, maupun untuk pengambilan keputusan keuangan.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas, untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) menyadari pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memajukan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, DSAK IAI melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menghadirkan SAK

yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) sebagai upaya mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, BPS berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran angka enam. Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan sensus ekonomi yang keempat. Pelaksanaan SE2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari persiapan, pendaftaran usaha atau perusahaan, pencacahan Usaha Menengah Besar (UMB) dan Usaha Mikro Kecil (UMK), sampai dengan memperoleh hasil dari kegiatan tersebut. Kegiatan pendaftaran usaha atau perusahaan mencakup seluruh lapangan usaha di luar pertanian yang dilakukan pada Mei 2016. Kegiatan Sensus Ekonomi 2016 menghasilkan data dasar kegiatan ekonomi khususnya mengenai jumlah usaha dan tenaga kerja. Data tersebut berguna bagi perencanaan. Berikut dibawah ini adalah tabel jumlah usaha atau perusahaan menurut kategori lapangan usaha pada tahun 2016 di wilayah Jakarta Timur.

Tabel 1. Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016

No.	Kategori Lapangan Usaha	Jumlah Usaha atau Perusahaan	
		Jumlah	Distribusi
1	Pertambangan, energi, pengelolaan air dan limbah	1.548	0,58
2	Industri pengolahan	17.990	6,74
3	Konstruksi	3.424	1,28
4	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	105.184	39,34
5	Pengangkutan dan pergudangan	15.828	5,93
6	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	69.297	25,98
7	Informasi dan komunikasi	7.551	2,83
8	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.420	0,53
9	Real estate	17.967	6,73
10	Jasa perusahaan	5.031	1,89
11	Jasa pendidikan	4.743	1,78
12	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	2.083	0,78
13	Jasa lainnya	14.705	5,51

Sumber : Diolah dari Listing Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) Kota Jakarta Timur

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui Jumlah Usaha atau Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016 di wilayah Jakarta Timur, Jumlah usahanya sebanyak 4.743, Jumlah Tenaga kerja sebanyak 58.109 tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa UMKM Jasa Pendidikan di wilayah Jakarta Timur cukup banyak. Salah satunya yaitu Bimbingan Belajar Galan adalah UMKM dibidang jasa pendidikan non formal yang beralamat Jl. Haji Taiman no.7 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Bimbingan Belajar Galan merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang berperan dalam peningkatan prestasi belajar siswa dari SD hingga SMA. Berdiri sejak tahun 2008 oleh enterpreneur muda Ikhsan Muttaqin S.Pd dengan misinya yaitu menyediakan solusi belajar bagi murid SD, SMP, SMA di Jabodetabek dengan pelayanan sepenuh hati, atau dimana kualitas dalam pelayanan adalah nomor satu serta menjadi tradisi dan jiwa tenaga pendidik dalam memberikan layanan prima kepada siswa, dan orang tua. Bimbingan Belajar Galan telah memiliki sertifikasi pendaftaran merek untuk jenis usaha jasa pendidikan, dengan nomor sertifikasi J002013044580.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan kemampuan pengembangan potensi dalam proses pembelajaran, banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan jasa kursus. Salah satu industri jasa yang berkembang saat ini adalah jasa bimbingan belajar atau lembaga pendidikan non formal. Keberadaan industri jasa mendapat tempat tersendiri dikalangan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak berstatus sebagai pelajar. Mereka mempunyai harapan bahwa setiap mengikuti bimbingan belajar, prestasi akademis mereka akan meningkat dan dapat memiliki bekal yang lebih baik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara tidak langsung kondisi seperti ini dapat meningkatkan persaingan di antara lembaga pendidikan sejenis dalam hal menawarkan produk yang terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut dibawah ini adalah tabel jumlah data pendidikan non formal di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2016

Tabel 2. Jumlah Data Pendidikan Non Formal di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2016

Tabel 2. Jumlah Data Pendidikan Non Formal di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2016

No.	Wilayah	Jumlah Kursus
1	Kepulauan Seribu	0
2	Jakarta Pusat	128
3	Jakarta Utara	144
4	Jakarta Barat	217
5	Jakarta Selatan	258
6	Jakarta Timur	149

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Telah diolah kembali).

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui Jumlah Data Pendidikan Non Formal di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2016 di wilayah Jakarta Timur, Jumlah kursus sebanyak 149. Hal ini menandakan bahwa Jasa pendidikan non formal di Jakarta Timur cukup banyak dan wilayah Jakarta Timur menempati urutan ketiga dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Jasa kursus pendidikan non formal ini bisa memberikan peluang manfaat yang sangat besar. Anak bisa mendapatkan manfaat belajar yang sulit ditemui di sekolah. Anak juga bisa lebih fokus dan perhatian mengikuti bimbingan belajar karena jumlah siswa yang jauh lebih sedikit dibanding jumlah murid di dalam kelas di sekolahnya. Manfaat lainnya, dengan jasa kursus atau bimbingan belajar seorang anak dapat memiliki kesempatan mengulang kembali pelajaran sekolah agar lebih bisa memahami lagi. Karena materi pelajaran tentu akan lebih mudah diingat apabila dipelajari berulang-ulang.

Menurut Jones (2008) Bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan seseorang kepada orang lain dalam menentukan pilihan dan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Lembaga ini bergerak dalam bidang jasa.sebagai lembaga yang memberikan pelayanan yang bertujuan untuk memperoleh laba atau bisa disebut perusahaan bisnis, layanan bimbingan belajar memiliki aset, kewajiban dan aset bersih. Sedangkan untuk melaksanakan aktivitas kegiatan jasanya, layanan bimbingan belajar membutuhkan dana untuk

mengadakan kegiatan dan memenuhi kebutuhan operasinya yang diperoleh dari pembayaran siswa layanan bimbingan belajar. Oleh karena itu diperlukan penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui aset, kewajiban, serta aset lancar yang ada di layanan bimbingan belajar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Bimbel Galan merupakan salah satu UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Namun, pemilik Bimbel Galan pernah mengikuti seminar, workshop yang berkaitan dengan marketing, strategi marketing, sumber daya manusia. Pemilik Bimbel Galan belum menyadari arti pentingnya melakukan pencatatan keuangan bagi suatu usaha, dalam implementasinya belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan standar akuntansi keuangan pada UMKM ternyata sudah banyak dilakukan, diantaranya Andriani dkk, (2014) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebuah studi intrepetatif pada peggy salon. Widyastuti (2017) melakukan penelitian mengenai pencatatan laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang jasa. Shonhadji dkk, (2017) meneliti tentang penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil, menengah berdasarkan SAK EMKM di Surabaya. Grafiti (2014) meneliti tentang minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan, aplikasi *theory of planned behavior* studi pada UMKM di Wilayah Bandungan.

Adanya fenomena mengenai masih adanya UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM dan *GAP research* tersebut, sudah adanya penelitian yang meneliti tentang penerapan standar akuntansi keuangan berdasarkan SAK ETAP namun belum banyaknya penelitian yang meneliti mengenai penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM) pada UMKM khususnya jasa pendidikan. Sehingga ada ketertarikan untuk meneliti lebih dalam mengenai UMKM jasa pendidikan dalam hal pencatatan keuangannya berdasarkan standar

akuntansi keuangan EMKM dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Pelaporan Keuangan Bimbingan Belajar Galan”.

I.2 Fokus Penelitian

Guna memperdalam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian. Menurut Moleong (2010 hlm 94) mengatakan penetapan fokus penelitian pada akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan penelitian, karena bisa terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian awal. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan peneliti sehingga memperoleh gambaran umum yang merupakan tahap permukaan tentang situasi sosial. Fokus dalam penelitian ini adalah

- a. Pencatatan keuangan yang selama ini dilakukan oleh Bimbingan Belajar Galan
- b. Perilaku pengelola Bimbel Galan yang tidak menerapkan pelaporan keuangannya berdasarkan SAK EMKM

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, peneliti dapat membangun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pencatatan keuangan yang selama ini dilakukan oleh Bimbingan Belajar Galan dan Mengapa Bimbingan Belajar Galan tidak menerapkan Pelaporan keuangannya berdasarkan SAK EMKM?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat memberikan tujuan dari peneltian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan keuangan yang selama ini dilakukan oleh Bimbingan Belajar Galan

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penyusunan laporan keuangannya berdasarkan SAK EMKM pada Bimbingan Belajar Galan

I.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan di bidang akuntansi keperilakuan dalam penerapan SAK EMKM dan menjadi bahan referensi serta acuan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa, sehingga dapat memberikan kajian keilmuan tentang penerapan SAK EMKM pada UMKM, mengingat penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM masih belum terealisasi secara optimal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti untuk terjun langsung di lapangan dan mengetahui perbedaan antara teori yang telah dipelajari dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
- 2) Bagi Bimbingan Belajar Galan, sebagai sumbangan pemikiran bagi UMKM guna meningkatkan kegiatan pencatatan keuangannya berdasarkan SAK EMKM. Sehingga laporan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pengambilan keputusan untuk memajukan usahanya.
- 3) Bagi kalangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan sebagai alat evaluasi bagi pelaku UMKM lainnya dalam penerapan pelaporan keuangannya berdasarkan SAK EMKM.